

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS MENGAJAR BATCH 5 DI KABUPATEN SUKABUMI DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)

Lasmini<sup>1\*</sup>, Irma Purnamasari<sup>2</sup>, Berry Sastrawan<sup>3</sup>.

<sup>123</sup>Universitas Djuanda, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[elas3488@gmail.com](mailto:elas3488@gmail.com) [irma.purnamasari@unida.ac.id](mailto:irma.purnamasari@unida.ac.id) [berry.sastrawan@unida.ac.id](mailto:berry.sastrawan@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Program kampus mengajar adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki tujuan untuk menyatukan sinergi dari pemerintah, akademisi dan praktisi guna dalam akselerasi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Pada implementasi-nya di lapangan tentu-nya akan ditemukan permasalahan ketidak sesuai antara kebijakan yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan Sampel yang digunakan Pada Penelitian Ini Menggunakan teknik sampling purposive. Adapun untuk menunjang analisis maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu *Wight mean score* (WMS). Dalam mengukur implementasi kebijakan Kampus mengajar batch 5 di Kabupaten Sukabumi menggunakan skala likert. Hasil yang diperoleh pada penelitian Implementasi Kebijakan Kampus Mengajar dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sukabumi yaitu dimensi komunikasi dengan score tertinggi yaitu 3.88 “Baik”, dimensi sumber daya kebijakan memperoleh nilai 3.55 di kategori-kan “Baik”, dimensi disposisi memperoleh score 4.08 dikategorikan “Baik” dan dimensi Organisasi memperoleh nilai 3.83 yang dikategorikan “Baik”. dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program kampus mengajar sudah berjalan dengan baik.

**Keywords:** Kampus Mengajar, Implementasi Kebijakan, dan Mutu Pendidikan.

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan. Selain itu pendidikan merupakan salah satu poin utama dalam menilai suatu negara, dapat diartikan kemajuan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikannya. Buruknya kualitas pendidikan pada suatu negara dapat menyebabkan negara tersebut mengalami ketertinggalan. Demikian pemerintah

Indonesia berusaha mencari cara dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada saat ini sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi standar pendidikan dunia. Dengan mengubah kurikulum, pemerintah Indonesia berharap dapat menjadi salah satu langkah upaya dalam menuntaskan perbaikan pendidikan pada saat ini. Pemerintah berharap kurikulum terbaru dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pada saat ini kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum merdeka belajar (MBKM) kurikulum tersebut memberikan kebebasan kepada siswa/mahasiswa agar dapat berpikir secara individu maupun kelompok. Kurikulum ini bertujuan agar dapat membantu menghasilkan siswa/mahasiswa yang kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan terlibat di masa mendatang. Program asistem mengajar di satuan pendidikan/Kampus Mengajar merupakan salah satu program *flagship* dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program kampus mengajar merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki tujuan untuk menyatukan sinergi dari pemerintah, akademisi dan praktisi guna dalam akselerasi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Program kampus mengajar ini dilakukan mengajar adik-adik tingkat SD-SMP selama 12 minggu di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Program tersebut dilaksanakan untuk membantu proses pembelajaran pada sekolah terbelakang dengan harapan adanya program ini sekolah yang menjadi penempatan mahasiswa dapat memperbaiki kualitas pendidikan, selain itu dengan adanya program kampus mengajar sekolah yang mengalami ketertinggalan akan mendapatkan perhatian lebih dari pihak kementerian pendidikan.

Kampus mengajar merupakan kebijakan yang dibuat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kampus Mengajar merupakan bentuk program kolaborasi antara mahasiswa dan siswa di jenjang pendidikan dasar. Pada program ini yang menjadi fokus yaitu dua luaran antara lain

peningkatan literasi dan numerasi pada siswa sekolah sasaran, peningkatan kemampuan kepemimpinan, inovasi, kreativitas, penyelesaian masalah, komunikasi, dan manajemen tim.

Pada dasarnya penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program kampus mengajar di lapangan terutama pada pelaksanaan program kampus mengajar batch 5 di kabupaten Sukabumi apakah pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan.

## **METODE PENELITIAN**

metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan Pada Penelitian ini yaitu teknik purposive sampling dan mendapatkan jumlah sampel sebanyak 17 mahasiswa dari 5 sekolah dengan kriteria yang sudah peneliti tentukan. Sempel yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu sekolah dengan kriteria jumlah siswa paling banyak, Sekolah dengan jumlah siswa paling sedikit, Sekolah dengan Jumlah Guru Paling Banyak, Sekolah dengan Jumlah guru paling sedikit, dan Sekolah Penempatan Peneliti.

Untuk menunjang analisis maka teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik antara lain:

### **1. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Adapun penelitian lapangan yang dilakukan pada penelitian implementasi kebijakan kampus menagajar menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi
- d. Metode angket (Kuesioner)

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) pada setudi ini yaitu dengan mencari, membaca dan mempelajari buku atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian untuk mendapatkan data. Pada penelitian judul ini peneliti mempelajari buku dan jurnal mengenai implementasi program Kampus Mengajar.

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data wight mean score (WMS). Untuk mengukur hasil dari penelitian implementasi kebijakan program kampus mengajar yaitu jawaban dari responden peneliti menggunakan skala likert.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Model implementasi yang di kemukakan oleh George Edward III dimana terdapat empat dimensi implementasi kebijakan yaitu (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi/Organisasi. Hasil dari tanggapan responden terhadap pernyataan atau indikator dari setiap jawaban dari pertanyaan pertanyaan tentang implementasi kebijakan program kampus mengajar batch 5 di kabupaten Sukabumi yaitu sebagai berikut:

### 1. Dimensi Komunikasi

No.	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Kriteria Penilaian
1.	kejelasan informasi yang disampaikan oleh pihak kampus mengajar, dan dinas pendidikan kepada mahasiswa	3.65	Baik
2.	Kejelasan informasi dan arahan yang disampaikan oleh DPL kepada mahasiswa	3.76	Baik
3.	Koordinasi yang terjalin antara mahasiswa dan pihak sekolah.	4.47	Sangat Baik
4.	Keselarasan informasi antar yang tercatat dalam kebijakan kampus mengajar dengan pelaksanaan di lapangan	3.65	Baik
<b>Skor Rataan Komunikasi</b>		<b>3.88</b>	<b>Baik</b>

Hasil pada Dimensi Komunikasi yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan respons yang Baik. Penilaian ini didasarkan pada rata-rata nilai dari setiap item pertanyaan dalam dimensi komunikasi, yang mencakup indikator kejelasan informasi, koordinasi, dan konsistensi informasi. Dari hasil evaluasi, tergambar bahwa aspek kejelasan informasi dianggap memadai, dengan pihak

terlibat mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Selain itu, koordinasi dalam penyampaian informasi juga dinilai baik, menunjukkan kemampuan untuk menjalin keterkaitan antar unsur komunikasi. Selanjutnya, konsistensi informasi juga ditemukan baik, menandakan bahwa pesan yang disampaikan konsisten dan tidak bercampur aduk. Dengan demikian, hasil ini mencerminkan bahwa dimensi komunikasi telah dikelola dengan baik, memberikan gambaran positif terkait dengan kejelasan, koordinasi, dan konsistensi informasi dalam lingkup penilaian ini.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan para guru di sekolah yang menjadi sasaran kampus mengajar batch 5, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan kejelasan informasi, koordinasi yang terjalin antar pihak dan keselarasan informasi yang disampaikan sudah terjalin dengan baik. Guru-guru sekolah menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak kampus sangat jelas dan terperinci. Hal ini membuat sekolah mampu merespons dengan cepat dan efisien terhadap kehadiran mahasiswa yang ditempatkan di lingkungan mereka. Kejelasan informasi tersebut memberikan panduan yang baik bagi sekolah, selain itu koordinasi baik yang sudah terjalin memberikan dampak positif pada proses pelaksanaan di lapangan sehingga pelaksanaan kampus mengajar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

## 2. Dimensi Sumber Daya Kebijakan

No.	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Kriteria Penilaian
1.	Keterlibatan pihak-pihak dalam mengambil keputusan	4.00	Baik
2.	Ketercukupan sumber daya tenaga pendidik di sekolah	3.53	Baik
3.	Fasilitas sekolah yang tersedia ?	2.65	Cukup Baik
4.	Fasilitas penunjang program kampus mengajar	4.00	Baik
Rataan		3.55	Baik

Hasil pada Dimensi Sumber Daya Kebijakan yang di tunjukan pada tabel di atas menunjukkan respons rata-rata yang dapat di kategorikan sebagai "Baik," dengan satu indikator menunjukkan respons "Cukup Baik." Hasil ini diperoleh dari nilai

setiap item pertanyaan dalam dimensi koordinasi, yang mencakup indikator keterlibatan pihak-pihak kampus mengajar, kecukupan tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas sekolah, dan fasilitas penunjang program kampus mengajar. Respons "Baik" secara umum mencerminkan keberhasilan dalam koordinasi antara berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan program kampus mengajar. Indikator keterlibatan pihak-pihak kampus mengajar mencapai tingkat respons yang memuaskan, menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang efektif. Sementara itu, meskipun mayoritas indikator menunjukkan respon "Baik," terdapat satu indikator yang dinilai "Cukup Baik," yaitu kecukupan tenaga pendidik.

Hasil wawancara dengan mahasiswa dan guru menunjukkan bahwa keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan selama pelaksanaan kampus mengajar sangat positif. Terdapat kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan mahasiswa dalam menjalin komunikasi, yang menjadi landasan penting dalam proses pengambilan keputusan. Saat melakukan perencanaan atau menanggapi situasi tertentu, keduanya menunjukkan tingkat komunikasi yang sangat baik. Namun terkait kecukupan tenaga pendidik terdapat informasi yang menunjukkan adanya ketidakcukupan tenaga pendidik di beberapa sekolah. Selain itu beberapa informan menyebutkan bahwa di sekolah mereka, terdapat kekurangan fasilitas sekolah seperti terdapat beberapa informan menyampaikan keluhannya terkait rusaknya beberapa ruang kelas, yang tentunya mempengaruhi kondisi belajar siswa.

### 3. Dimensi Disposisi

No.	Item Pertanyaan	Rata-Rata	Kriteria Penilaian
1.	Kerja sama yang terjalin antar pihak-pihak yang terlibat	4.18	Baik

2.	Kolaborasi antara pihak dalam pelaksanaan kampus mengajar	4.06	Baik
3.	Tingkat kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan ide-ide baru dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan kondisi yang terjadi.	4.00	Baik
Rataan		4.08	Baik

Hasil pada Dimensi Disposisi yang ditunjukkan pada tabel di atas secara keseluruhan memberikan respon yang positif dengan penilaian "Baik." Analisis nilai setiap item pertanyaan dalam dimensi ini menyoroti aspek-aspek kunci, termasuk indikator kerja sama dan indikator kreativitas. Dari segi kerja sama, peserta menunjukkan tingkat responsif yang tinggi terhadap konsep kerja tim antara mahasiswa, saling mendukung, dan kolaborasi efektif dengan pihak-pihak yang terlibat kampus mengajar. dengan begitu maka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, dalam hal kreativitas, partisipan menunjukkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, menghadirkan ide-ide inovatif, dan mengatasi tantangan dengan pendekatan yang kreatif. Dengan demikian, keseluruhan gambaran pada Dimensi Disposisi memberikan gambaran positif terhadap sikap dan orientasi pihak-pihak terlibat dalam menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan kerja sama dan kreativitas. Hasil ini mencerminkan mahasiswa dan pihak-pihak terlibat terutama guru terhadap pengembangan potensi kolaboratif dan inovatif, yang dapat membawa dampak positif dalam konteks peningkatan pembelajaran.

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada guru dan mahasiswa kampus mengajar batch 5 di kabupaten Sukabumi berkaitan dengan Kerja sama yang terjalin antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kampus mengajar meliputi Mahasiswa, guru, DPL, dan Dinas pendidikan menunjukkan kerja sama antara pihak cukup baik. Hal tersebut di buktikan selama masa penugasan berlangsung mahasiswa dan guru dari pihak sekolah bekerjasama untuk merealisasikan perencanaan program

yang sudah dirancang. Selain itu berkaitan dengan kolaborasi antara pihak dalam pelaksanaan kampus mengajar menurut pihak guru kolaborasi antar mahasiswa dan guru sangat berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Adapun mahasiswa dalam menghasilkan ide-ide baru dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan kondisi yang terjadi mahasiswa dianggap cukup kreatif dalam merancang program untuk mendukung pembelajaran siswa di sekolah sehingga selama masa pelaksanaan kampus mengajar berlangsung siswa sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran di sekolah.

#### 4. Dimensi Organisasi

No.	Item pertanyaan	Rata-Rata	Kriteria Penilaian
1.	Bagaimana pihak sekolah melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh pihak kampus mengajar.	4.00	Baik
2.	Adanya SOP membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan di lapangan	3.65	Baik
Rataan		3.85	Baik

Hasil pada dimensi Organisasi yang ditunjukkan pada tabel di atas yaitu pada Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menggambarkan pencapaian yang sangat positif, dengan hasil penilaian mencapai kategori "Baik" pada kedua indikator yang diukur. Hal ini tecermin dari respons positif dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan terkait implementasi SOP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, terungkap bahwa keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) atau kampus sangat berperan positif dalam mendukung aktivitas sekolah dalam menerima mahasiswa. Pihak sekolah menegaskan bahwa adanya SOP ini memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur, memudahkan proses integrasi mahasiswa di lingkungan sekolah. Dalam pandangan

mereka, SOP tersebut tidak hanya memberikan kejelasan dalam hal tata kelola, tetapi juga mengoptimalkan proses penerimaan mahasiswa di sekolah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pada penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Kampus Mengajar Batch 5 dalam Upaya Meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan hasil akhir rata-rata mendapatkan respons positif dengan kriteria "Baik". Analisis variabel dari keempat dimensi yang ditentukan dari model implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi dimensi komunikasi dengan score tertinggi yaitu 4.47 dapat di kategorikan "Sangat Baik" dan score terendah pada dimensi komunikasi yaitu 3.65 yang dikategorikan "Baik". Adapun pada dimensi sumber daya kebijakan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 4.00 yang dikategorikan "Baik" adapun score terendah pada dimensi ini mendapatkan score 2.65 yang di kategorikan "Cukup Baik". Sedangkan pada dimensi disposisi memperoleh score tertinggi yaitu 4.18 yang dikategorikan "Baik" dan score paling rendah pada dimensi ini memperoleh score nilai 4.00 yang dikategorikan "Baik". Lalu pada dimensi ke 4 yaitu dimensi Organisasi memperoleh nilai tertinggi 4.00 yang dikategorikan "Baik" dan score paling rendah pada dimensi ini yaitu memperoleh score nilai 3.65 yang dikategorikan "Baik"

Adapun hambatan pada implementasi kebijakan kampus mengajar di Kabupaten Sukabumi di antaranya adalah, kurangnya fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan ruang kelas yang berdasarkan dari informan beberapa sekolah pada fasilitas ruang kelas yang menjadi tempat untuk belajar siswa mengalami kerusakan sehingga dapat di kategorikan ruangnya sudah tidak layak pakai hal tersebut dapat menjadi penghambat proses pembelajaran yang mengakibatkan kurang kondusifnya belajar siswa. Beberapa sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik sehingga dengan adanya program kampus mengajar membantu proses pembelajaran sehingga siswa mendapatkan kembali haknya dalam waktu belajar yang sesuai dengan jadwal yang

sudah ditentukan. Banyaknya kegiatan di luar kegiatan yang sudah dirancang mengakibatkan tidak tepatnya pelaksanaan program dengan time line yang sudah ditentukan dikarenakan kegiatan di luar program yang sudah dirancang dirasa lebih *urgent* untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

## REFERENSI

### Buku

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, R. d. (2023). *Buku Saku Mahasiswa Kampus Mengajar 5 2023*. Jakarta: Program Kampus Mengajar .
- Dr. Drs. Suparno, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya .
- Joko Pramono. S. Sos., M. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Kota Surakarkarta: Unisri Press 2020.
- Kementerian Pendidikan, K. R. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Direktorat Jendral Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.
- M.Si, H.J Ruliyawati Kasmad (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedaikarsara.
- Mengajar, T. P. (2023). *Buku Panduan Kampus Mengajar*. Jakarta: Program Kampus Mengajar.
- Profesi, D. P. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka (Mbkm)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. .
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

- Apriliyani, N. V., Hernawan, D., Purnamasari, I., Goris Seran, G. ., & Sastrawan, B. (2022). *Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. *Jurnal Governansi*, 8(1), 11–18.
- Fika Khoirotul Jannah1, A. J. (2022). *Implementasi Program Kampus Mengajar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 45 Gresik*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 204-210.
- Fika Khoirotul Jannah1, A. J. (204-210). *Implementasi Program Kampus Mengajar Dalam Meningkatkan* . *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2022.
- Hernawan, D., Goris Seran, G., Purnamasari, I., M. Purnomo, A. dan Apriliani, A. 2022. *Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. *Jurnal Governansi*. 8, 1 (Apr 2022), 1–10.
- Kurniawati, F. N. (2022). *Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Dan Solusi*. *Academy of Education Journal*, Vol. 13 Nomor 1.
- Noerbella, D. (2022). *Implementasi Program Kampus Mengajar Angkatan 2 Dalam Meningkatkan Kompetensi Literasi Dan Numerasi Peserta Didik*. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 480-489.
- Sarimai, A. (20). *Implementasi Kebijakan Program Merdeka Kampus Merdeka (Mbkm) Di Universitas Muhammadiyah Makassar*. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 10-23.

- Widiyastuti, I. (2016). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu*. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 6 Vol. V.
- Yoga Budi Bhakti, M. R. (2022). *Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Di Perguruan Tinggi*. Research and Development Journal Of Education, 783-790.
- Yuliah, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Volume 30 Nomor 2 Hal. 129-152.